

Perempuan Nelayan: Peran, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi Lokal



Didiek Tranggono, Jojok Dwiridhotjahjono, Sonja Andarini, Resa Rasyidah

2017



ISBN: 978-602-7851-74-0

**Perempuan Nelayan: Peran, Pemberdayaan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Berbasis Potensi Lokal**

**Didiek Tranggono
Jojok Dwiridotjahyono
Sonja Andarini
Resa Rasyidah**

STUDI STRATEGI

Didiek Tranggono
Jojok Dwiridhotjahjono
Sonja Andarini
Resa Rasyidah

Penata Letak : Resa Rasyidah
Desain Cover : Praja Firdaus N.

Cetakan Pertama: 2017

Penerbit Cakra Studi Global Strategis
Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga
Gedung B FISIP Unair
Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286
Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62 31 61016125; Faks. +62 31 5012442
Email: jhi.unair@gmail.com
Website: http://journal.hi.unair.ac.id/media_89.html

ISBN 978-602-7851-74-0



PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya penulisan buku *Perempuan Nelayan: Peran, Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi Lokal*. Penulisan buku ini bertujuan sebagai luaran dari penelitian para penulis.

Buku ini membahas tentang perempuan nelayan yang terdiri dari beberapa bab. Diantaranya bab yang menjelaskan tentang kondisi alam dan geofrafis wilayah pesisir, kehidupan masyarakat pesisir, peran perempuan nelayan dalam kehidupan masyarakat pesisir serta pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal perempuan nelayan khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semangat yang diberikan keluarga dan seluruh rekan dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jatim dalam penyelesaian penulisan buku ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga buku ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, Agustus 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Alam dan Geografis Wilayah Pesisir.....	1
1.2 Ekosistem Wilayah Pesisir	3
BAB 2 KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR.....	9
2.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir.....	9
2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	12
BAB 3 PEREMPUAN NELAYAN.....	23
3.1 Peran Perempuan dalam Masyarakat Pesisir.....	23
3.2. Peluang dan Tantangan Perempuan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	26
BAB 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR.....	29
4.1 Pemberdayaan Ekonomi Produktif.....	31
4.2 Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal.....	33
4.3 Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kehidupan Masyarakat Pesisir	10
Gambar 2.2 Perahu nelayan bersandar di pantai Kabupaten Sidoarjo, tidak dapat melaut akibat angin kencang.....	11
Gambar 2.3 Kerang Putih, salah satu komoditas utama masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo.....	19
Gambar 2.4 Tradisi Nyadran yang dilakukan masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo.....	22
Gambar 3.1 Perempuan nelayan sedang menangkap kerang di Kabupaten Sidoarjo.....	25
Gambar 3.2 Perempuan nelayan sedang menguliti kerang hasil tangkapan Di Kabupaten Sidoarjo.....	27

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Alam dan Geografis Wilayah Pesisir

Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai kurang lebih 81.000 km menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Wilayah pesisir merupakan wilayah transisi di antara laut dan daratan (Kay dan Alder, 2005). Wilayah pesisir adalah tempat bertemunya daratan dan lautan dimana segala macam proses yang terjadi tergantung dari interaksi yang sangat intens dari kedua wilayah daratan dan lautan tersebut (Dahuri, 1996). Definisi terkait wilayah pesisir ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyatakan bahwa Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Scura et al. (1992) dalam Cicin-Sain and Knecht (1998), mengemukakan bahwa di wilayah pesisir terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Karakteristik wilayah pesisir di antaranya yaitu: (a) Memiliki habitat dan ekosistem (seperti estuari, terumbu karang, padang lamun) yang dapat menyediakan suatu (seperti ikan, minyak bumi, mineral) dan jasa (seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi) untuk masyarakat pesisir; (b) Dicitrakan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya dan ruang oleh berbagai stakeholders, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumberdaya; (c) Menyediakan sumberdaya ekonomi nasional dari wilayah pesisir dimana dapat menghasilkan GNP (*gross national product*) dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir dan lain-lain; (d) Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi.

Dilihat dari segi ekologis, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini merupakan kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut sehingga membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif. Batas wilayah pesisir ke arah darat mencakup daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan (seperti pasang surut, percikan air gelombang, intrusi air laut dan angin laut). Sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, termasuk air sungai dan aliran air permukaan (*run off*), sedimentasi, pencemaran dan lain-lain yang merupakan penghubung (*channels*) bagi dampak yang dihasilkan dari kegiatan manusia di daratan ke lingkungan laut.

Di Wilayah pesisir terdapat daerah pasang surut permukaan air laut. Daerah yang terkena pasang surut itu bermacam-macam antara lain gisik, rataan pasang surut, lumpur pasang surut, rawa payau, delta, rawa mangrove, dan padang rumput (*seagrass beds*) (Yayasan Terangi dalam Andarini, dkk. 2016). Terdapat pula pola sungai yang berhubungan dengan sungai utamanya halus yang membantu dalam pergerakan vegetasi lumpur.

Manfaat wilayah pesisir bagi manusia luar biasa. Nilai ekonominya tinggi dan memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir memiliki berbagai sumber daya masa depan dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal. Selain memiliki potensi perikanan yang besar, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lautan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi pertambangan, pariwisata bahari, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan ekowisata. (Andarini, dkk. 2016)

Seiring peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan juga semakin bertambahnya jumlah penduduk, nilai ekonomi wilayah pesisir semakin bertambah. Namun, semakin bertambahnya nilai ekonomi wilayah pesisir ini menimbulkan konsekuensi berupa masalah

pengelolaan karena terjadinya konflik pemanfaatan yang muncul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah tersebut. (Nurmalasari, 2001)

Fakta menunjukkan bahwa kota-kota terpenting di dunia berada tidak jauh dari laut karena kawasan pesisir laut memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kawasan pesisir juga memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Wilayah pesisir juga menjadi penangkal masuknya gelombang besar air laut ke darat karena keberadaan hutan mangrove (Muttaqiena dkk, 2009). Di Indonesia, wilayah pesisir tampaknya menjadi cikal bakal dari perkembangan urbanisasi pada masa yang akan datang. Tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. (Andarini, dkk. 2016)

1.2 Ekosistem Wilayah Pesisir

Menurut Aci (2012), ekosistem pesisir merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati (organisme hidup) dan nir-hayati (fisik), yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem. (Masalu 2008 dalam Djau 2012). Wilayah ini termasuk zona penting dan perlu dijaga kelestariannya karena perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia baik langsung atau tidak langsung maupun proses-proses alamiah yang terdapat di atas lahan maupun lautan (Djau, 2012).

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis, menurut Bengen (2001), memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu:

- (1) Sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas,
- (2) Penerima limbah,
- (3) Penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*),
- (4) Penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*).

Karakteristik Ekosistem di perairan laut dangkal pada umumnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove pada dasarnya dilindungi seperti pada tertera di dalam UU No.32/2009 dan UU No. 5/1990.

Karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai sejumlah ekosistem yang berada di daerah pesisir. Di antara ekosistem lain yang ikut ke dalam wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun (*seagrass*), ekosistem terumbu karang, dan ekosistem estuaria (Aci 2012)

a. Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan. Formasi mangrove merupakan perpaduan antara daratan dan lautan. Mangrove tergantung pada air laut (pasang) dan air tawar sebagai sumber makanannya serta endapan debu dari erosi daerah hulu sebagai bahan pendukung substratnya. (Andarini, dkk. 2016)

Mangrove pada umumnya tumbuh di daerah intertidal yang memiliki jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir. Tergenang oleh air laut secara berkala, dapat setiap hari maupun hanya tergenang pada saat surut purnama, frekuensi genangan ini menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove. Selain itu, mangrove juga membutuhkan suplai air tawar dari daratan, dan biasanya hidup baik pada daerah yang cukup terlindung dari gelombang besar dan pasang surut yang kuat. (Andarini, dkk. 2016)

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang berpotensi bagi ekowisata (Anwar & Gunawan, 2007), selain dikarenakan pohon mangrove yang digunakan untuk tempat bersembunyiya udang dan mengurangi abrasi, namun berfungsi pula sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat setempat dari segi

transportasi, pemandu wisata, pedagang, petambak, dan nelayan. (Andarini, dkk. 2016)

Tanaman mangrove berperan juga sebagai perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus (Irwanto, 2006). Mangrove juga berfungsi antara lain sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan lumpur serta penangkap sedimen; penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahannya; daerah asuhan (*nursery ground*), daerah pencari makan (*feeding ground*), daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lain; penghasil kayu untuk berbagai macam tujuan; pemasok larva ikan, udang dll.; serta sebagai daerah tujuan wisata alam.

Biota yang paling banyak dijumpai di dalam ekosistem mangrove adalah crustacea dan moluska, kepiting, *Uca* sp dan berbagai spesies sesamanya, umumnya dijumpai di hutan mangrove kepiting-kepiting yang dapat dikonsumsi (*Scylla serrata*) termasuk produk mangrove yang bernilai ekonomis dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar hutan mangrove (Pamudji, 2010 dalam Kahar 2014).

b. Ekosistem Padang Lamun (*Seagrass*)

Ekosistem terumbu karang, memperlihatkan akan keanekaragaman hayati yang tersebut di wilayah laut. Terumbu karang tersebut seperti ekosistem mangrove, mampu digunakan sebagai ekowisata. (Andarini, dkk. 2016) Lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal, semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu (monokotil) yang mempunyai akar, rimpang (rhizoma), daun, bunga dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut (algae), fungsi utama ekosistem lamun dapat memberikan nutrisi terhadap biota yang berada diperairan sekitarnya, ekosistem lamun merupakan produsen primer dalam rantai makanan di perairan laut dengan

produktivitas primer berkisar antara 900-4650 gC/m/tahun. (Azkab, 2010; Bengen 2001)

Pertumbuhan, morfologi, kelimpahan dan produktivitas primer lamun pada suatu perairan umumnya ditentukan oleh ketersediaan zat hara fosfat, nitrat dan ammonium. Sejak tahun 1980 sampai sekarang, diperkirakan lamun di dunia telah mengalami degradasi sebesar 54 % (Purnama, 2011).

Sebagaimana terumbu karang, padang lamun menjadi menarik karena wilayahnya sering menjadi tempat berkumpul berbagai flora dan fauna akuatik lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Di padang lamun juga hidup alga (rumput laut), kerang-kerangan (molusca), beragam jenis ekinodermata (teripang-teripangan), udang, dan berbagai jenis ikan. Padang lamun merupakan sumber makan bagi ikan dan juga tempat bersembunyi ikan.

Dari sekian banyak hewan laut, penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan ikan duyung atau dugong (dugong dugon) adalah dua hewan yang sangat menyukai padang lamun. Boleh dikatakan, dua hewan ini amat bergantung pada lamun. Hal ini tak lain karena tumbuhan tersebut merupakan sumber makanan penyu hijau dan dugong. Penyu hijau biasanya menyantap jenis lamun *Cymodoceae*, *Thalassia*, dan *Halophila*. Sedangkan dugong senang memakan jenis *Poisidonia* dan *Halophila*. Dugong mengkonsumsi lamun terutama bagian daun dan akar rimpangnya karena dua bagian ini memiliki kandungan nitrogen tinggi.

Lamun merupakan istilah untuk rumput laut (*seagrass*), harus dibedakan dengan rumput laut (*sea weed*) yang merupakan anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga (ganggang). Sea weed ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Sedangkan lamun merupakan tumbuhan berbunga (angiospermae) yang hidup di perairan pesisir/pantai laut, membentuk ekosistem penting sebagai produsen primer di perairan laut tropis selain fitoplankton. Tumbuhan ini terdiri dari rhizoma, daun dan akar. Rhizoma merupakan batang yang merayap di substrat dan berbuku-buku, yang biasanya pada buku yang tumbuh ke atas akan

berdaun dan berbunga. Pada buku tersebut tumbuh akar/rhizoma, yang dengan akar ini lamun dapat menancapkan diri dengan kokoh di dasar laut sehingga tahan terhadap hempasan gelombang laut. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011)

Fungsi padang lamun: sebagai produsen makanan berlimpah bahan organik, daunnya yang tinggi dan banyak sebagai tempat hidup organisme efit, peredam arus, pengurang erosi dan pengumpul substrat serta sedimen oleh akarnya serta tempat mencari makan dugong serta sejumlah kecil ikan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011)

c. Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan suatu himpunan integral dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Ekosistem ini merupakan ekosistem perairan dangkal yang sangat produktif sehingga sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia, terumbu karang mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai gudang keaekaragaman hayati laut, tempat tinggal sementara atau tetap, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat berpijah (*spawning ground*), daerah asuhan (*nursery ground*), tempat berlindung bagi hewan laut lainnya. Terumbu karang berfungsi sebagai biofisik dimana siklus biologi kimiawi dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktifitas yang sangat tinggi (Siringoringo, 2010).

Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga penghasil kapur yang dikenal dengan nama karang batu (*stony coral*). Karang batu yang bentuk koloninya beraneka ragam ini merupakan substrat dasar terumbu karang yang sangat keras dan berfungsi sebagai rumah/tempat tinggal, tempat berlindung tempat mencari makan dan tempat memijah bagi berbagai macam jenis biota asosiasi terumbu karang lainnya seperti kerang-kerangan (*mollusca*), udang-kepiting (*crustacea*), bintang laut (*echinodermata*), cacing (*polychaeta*), sponge (*porifera*), ikan dan plankton.

Fungsi dan manfaat terumbu karang antara lain: sumber makanan untuk beberapa jenis ikan, udang, lobster dan ikan; bahan obat-obatan; bahan budidaya; sarana rekreasi laut; tempat memijah, pengasuhan dan pembesaran mayoritas jenis ikan; penghalang erosi dari gelombang air laut; sebagai bahan bangunan, dan lain-lain.

d. Ekosistem Estuaria

Estuaria atau sering disebut Estuari adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur (endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut). (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten, 2011) Estuaria atau muara pasang surut dari sungai yang besar. Estuaria adalah suatu tubuh perairan pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan didalamnya air laut terencerkan oleh air tawar yang berasal dari *drainase* daratan. Estuaria biasanya sebagai pusat permukiman berbagai kehidupan. seperti mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi. (Yayasan Terangi, dalam Andarini, dkk. 2016)

Berdasarkan karakteristik geomorfologi, estuari dapat dikelompokkan menjadi: Estuari dataran pesisir, dimana pembentukannya terjadi karena kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai; Laguna (gobah) atau teluk semi tertutup, terbentuk oleh beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut; dan Fjords, adalah estuari yang pembentukannya karena aktifitas glasier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011)

BAB 2

KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR

2.1. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir, hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Menurut Prianto (2005) karakteristik masyarakat yang hidup di daerah pesisir, secara sosial ekonomis dipengaruhi oleh sumber perekonomian dari wilayah laut. Jenis mata pencaharian mereka umumnya memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim.

Masyarakat pesisir berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerahnya menurut Johny Purba (2002) dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu:

- a) Masyarakat Perairan, yaitu kesatuan sosial yang hidup dari sumberdaya perairan, cenderung terasing dari kontak dengan masyarakat lain, lebih banyak hidup dilingkungan perairan daripada darat, berpindah- pindah dari satu teritorial perairan tertentu. Golongan ini cenderung egaliter dan mengelompok dalam kekerabatan setingkat dan kecil.
- b) Masyarakat nelayan, golongan ini umumnya sudah bermukim secara tetap di daerah yang mudah mengalami kontak dengan masyarakat lain, sistem ekonominya bukan lagi subsistem tetapi sudah ke sistem perdagangan yaitu hasil sudah tidak dikonsumsi sendiri namun sudah didistribusikan dengan imbalan ekonomis kepada pihak lain. Meski memanfaatkan sumberdaya perairan, namun kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan di darat.
- c) Masyarakat pesisir tradisional. Meski berdiam dekat perairan laut, tetapi sedikit sekali menggantungkan hidupnya di laut. Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumberdaya di daratan sebagai petani, pemburu atau peramu. Pengetahuan tentang lingkungan darat lebih mendominasi daripada pengetahuan lautan.

Berbeda dengan Johny Purba, Sunoto (1997 dalam Purba 2002) membedakan masyarakat pesisir bedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kegiatan utamanya, yaitu: nelayan penangkap ikan dan nelayan petambak. Nelayan penangkap ikan adalah seseorang yang pekerjaan utamanya di sektor perikanan laut dan mengandalkan ketersediaan sumberdaya ikan di alam bebas. Nelayan petambak didefinisikan sebagai nelayan yang kegiatan utamanya membudidayakan ikan atau sumberdaya laut lainnya yang berbasis pada daratan dan perairan dangkal di wilayah pantai.



Gambar 2.1 Kehidupan Masyarakat Pesisir

Kusumastanto (2002 dalam Wasak, 2012) memberikan gambaran karakteristik umum masyarakat pesisir adalah sebagai berikut: pertama, ketergantungan pada kondisi ekosistem dan lingkungan. Keadaan ini berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pencemaran, karena dapat mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, ketergantungan pada musim, ini karakteristik yang menonjol di masyarakat pesisir, terutama bagi nelayan kecil. Pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur dan

ketiga, ketergantungan pada pasar. Karena komoditas yang mereka hasilkan harus segera dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka nelayan dan petambak harus menjual sebagian besar hasilnya dan bersifat segera agar tidak rusak.

Sepanjang pesisir pantai merupakan wilayah aktif penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang waktu tergantung pada angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh iklim tropis dengan pola musim kemarau (Juni - September) dan musim hujan (Desember - Maret), dengan musim transisi April – Mei dan Oktober - November.



Gambar 2.2 Perahu nelayan bersandar di pantai Kabupaten Sidoarjo, tidak dapat melaut akibat angin kencang.

Adanya perubahan iklim akan berpengaruh terhadap dinamika lingkungan hidup perairan laut. Perubahan ini kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan tingkah laku ikan (migrasi dan memijah) serta periodisitas penangkapan ikan. Ketika musim kemarau (panas) tiba di mana angin bertiup dari arah selatan, akan berpengaruh terhadap aktivitas nelayan yang berada di sepanjang pesisir pantai bagian selatan,

terutama nelayan dengan alat tangkap pancing dan pukat pantai; demikian juga ketika musim penghujan tiba di mana angin bertiup dari arah barat menuju utara, akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang pesisir bagian utara.

2.2.Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Raharjo (1999) dalam Wasak (2012) kemiskinan adalah ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibandingkan petani. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- 1) Tantangan alam yang dihadapi oleh nelayan sangat berat termasuk faktor musim.
- 2) Pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan.
- 3) Keterbatasan penguasaan modal, perahu dan alat tangkap
- 4) Keadaan pemukiman perumahan yang tidak memadai
- 5) Karakteristik sosial ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan

Masyarakat pesisir yang didominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Lewaherilla, 2002). Kawasan pemukiman di pesisir pun umumnya tak memiliki legalitas, terutama area hasil reklamasi swadaya masyarakat (Suprijanto, 2006).

Suharti (2000) dalam Manumono (2008) mengemukakan bahwa masyarakat kawasan pesisir cenderung agresif. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan pesisir yang panas dan terbuka, keluarga nelayan mudah diprovokasi, dan salah satu kebiasaan yang jamak di kalangan nelayan (masyarakat pesisir) adalah karena kemudahan mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif. (Wasak 2012) Para nelayan tersebut menghadapi sumber daya yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun, serta beresiko tinggi. Oleh karena itu

masyarakat pesisir cenderung memiliki karakter tegas, keras dan terbuka.

Masyarakat pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan, 2007 dalam Djuwita 2016). Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tapi masih memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Kehidupan pesisir Indonesia seharusnya menjadikan para nelayan sebagai orang yang kaya karena kekayaan laut Indonesia yang melimpah. Namun kenyataannya, mereka masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan bahkan masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa faktor penyebabnya adalah saat nelayan tidak melaut karena cuaca buruk, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi maka mereka memilih untuk berhutang. Faktor lainnya penyebab kemiskinan di kalangan keluarga nelayan karena sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan buruh dengan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan yang rendah.

Rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut (*common property*) sebagai faktor produksi, jam kerja harus mengikuti kondisi oseanografis (melaut hanya rata-rata sekitar 20 hari dalam satu bulan, sisanya relatif menganggur). Demikian juga pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh lelaki. Hal ini mengandung arti bahwa keluarga yang lain tidak dapat membantu

secara penuh, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin.(Wasak 2012)

Singkatnya, karakteristik masyarakat pesisir sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim, dan juga pasar. Maka, karakteristik masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor-2 lainnya. Beberapa sifat & karakteristik masyarakat pesisir sebagai berikut:

a) Ketergantungan pada kondisi lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, terutama di Indonesia. Kondisi masyarakat pesisir itu menjadi sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekaligus sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah-limbah industri maupun domestik dapat mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

b) Ketergantungan pada musim

Karakteristik lain yang sangat mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini akan semakin besar pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan, para nelayan akan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklis kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur.

Keadaan ini mempunyai implikasi besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang yang mahal pada musim tangkap. Namun pada musim peceklis, pendapatan mereka drastis menurun sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk. Belum lagi ditambah pola hidup mereka yang menerapkan prinsip ekonomi yang “tidak hemat”, artinya saat hasil tangkap memuncak, mereka cenderung tidak menyimpan

hasil untuk menutupi kekurangan ekonomi di saat kegiatan tangkap menurun sehingga banyak dari nelayan-nelayan tersebut yang harus meminjam uang bahkan menjual barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara umum, pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Pada suatu hari, mungkin nelayan memperoleh tangkapan yang sangat tinggi, tapi pada hari berikutnya bisa saja “kosong”. Hasil tangkapan dan pada gilirannya pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh jumlah nelayan operasi penangkapan di suatu daerah penangkapan. Di daerah yang padat penduduknya, akan mengalami kelebihan tangkap (*overfishing*). Hal ini mengakibatkan volume hasil tangkap dari para nelayan menjadi semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka.

Kondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan masyarakat di kalangan nelayan maupun petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat patron-klien. Karena keadaan ekonomi yang buruk, maka para nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau dari para pedagang pengumpul (tauke).

Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterkaitan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnyanya sehingga bisnis tetap berjalan.

c) Terdapat Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

Stratifikasi sosial masyarakat pesisir data dibedakan menjadi tiga jenis yaitu stratifikasi karena status ekonomi, stratifikasi karena perbedaan status politik dan stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan. Stratifikasi berdasarkan ekonomi dan penguasaan alat tangkap, yaitu jika dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan atau tidak ketidaksetaraan status ekonomi, pada masyarakat nelayan umumnya terdapat tiga strata kelompok, meliputi strata atas, strata kedua dan buruh nelayan. Strata atas, yaitu mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain. Buruh atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak bisa sampai dua atau tiga puluhan. Seringkali nelayan besar juga merangkap sebagai pedanggang pengumpul. Namun demikian, biasanya ada pula pedagang pengumpul yang bukan nelayan, sehingga pedagang ini merupakan kelas tersendiri. Strata kedua, adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini, biasanya pemilik tersebut ikut melaut dan memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tetapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja. Strata terakhir adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi lebih banyak pula buruh ini yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri.

Stratifikasi karena perbedaan status politik, yaitu jika terdapat ranking sosial berdasarkan otoritas, prestise, kehormatan dan gelar. Misalnya seseorang yang memperoleh gelar sebagai kepala desa dan pemimpin-pemimpin desa memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga-warga biasa.

Stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan misalnya stratifikasi pada petani tambak, yaitu :

- 1) Strata atas adalah mereka yang menguasai tambak yang luas.
- 2) Strata menengah yang memiliki luas tambak yang sedang/kecil.

3) Strata bawah adalah mereka yang tidak memiliki tambak, melainkan hanya mengelola atau sebagai buruh.

d) Ketergantungan Pada Pasar

Karakteristik lain masyarakat pesisir ini adalah sifat ketergantungan terhadap keadaan pasar. Hal ini disebabkan karena hasil tangkap mereka itu harus dijual terlebih dahulu sebelum hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik tersebut mempunyai implikasi yang sangat penting, yakni masyarakat pesisir sangat peka terhadap harga. Perubahan harga produk perikanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

e) Aktivitas Kaum Perempuan dan Anak-Anak

Ciri khas lain dari suatu masyarakat pesisir adalah aktivitas kaum perempuan dan anak-anak. Pada masyarakat ini, umumnya perempuan dan anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Kaum perempuan (orang tua maupun anak-anak) seringkali bekerja sebagai pedagang ikan (pengecer), baik pengecer ikan segar maupun ikan olahan. Mereka juga melakukan pengolahan hasil tangkapan, baik pengolahan kecil-kecilan di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai buruh pada pengusaha pengolahan ikan atau hasil tangkap lainnya. Sementara itu anak laki-laki seringkali telah dilibatkan dalam kegiatan melaut. Ini antara lain yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak sekolah.

f) Rentan Terhadap Pengaruh Eksternal

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (open access), kecuali pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe Talud dengan kelembagaan Maneeh.

Dengan karakteristik yang khas dan open access tersebut, maka setiap pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya timbul konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta sangat mudah terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas. Selain itu penumpukan limbah-limbah dari daratan seperti limbah industri dan limbah domestik sangat mempengaruhi kondisi mereka. Penurunan kualitas perairan dapat menurunkan hasil tangkap mereka sehingga pendapatan mereka pun merosot. Jika hal ini terjadi maka kondisi ekonomi mereka akan semakin terpuruk.

g) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan dan Ilmu Pengetahuan

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resources base), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), Kemiskinan masyarakat nelayan (problem struktural), penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Sebagian besar penduduk wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang.

h) Memiliki Sistem Kepercayaan dan Adat Yang Kuat

Dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu

juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah

Salah satu wilayah yang memiliki masyarakat pesisir adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup tinggi. Salah satu hasil komoditas perikanan unggulannya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir adalah kerang-kerangan. (Suara Media Nasional 2016) Sisi timur Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor perekonomian andalan di kabupaten tersebut. Hasil pra survei yang dilakukan oleh tim Perikanan Tangkap WWF-Indonesia, menyebutkan pemanfaatan kerang di kabupaten ini sudah dilakukan sejak era 1990-an. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah populasi manusia yang hidup di wilayah pesisir kabupaten ini, tentunya juga meningkatkan upaya penangkapan komoditas kerang. (WWF, 2016)



Gambar 2.3 Kerang Putih, salah satu komoditas utama masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo

Kondisi pemanfaatan ini didukung pula dengan habitat hidup kerang yang bisa dikatakan dekat dengan pantai, sehingga komoditas ini sangat potensial untuk terus dimanfaatkan. (Suara Media Nasional 2016)

Menurut data statistik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, produksi kerang darah (*Tegillarca granosa*) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 952,7 ton. Nilai ini belum ditambahkan hasil dari tangkapan kerang lainnya, meliputi kerang bulu dan kerang batik. (WWF 2016) Kendati demikian, potensi ini masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Sidoarjo masih rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ini juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Terdapat 34% dari masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo yang putus sekolah. (Hidayati dan Solichah, t.t) Alasannya dikarenakan biaya sekolah yang tinggi. Hal tersebut wajar mengingat Sidoarjo masuk kategori kota industri sehingga biaya sekolahpun relatif mahal.

Pekerjaan mencari ikan di laut latar belakang pendidikan memanglah bukan hal yang terpenting mengingat pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot dan pengalaman bukan pemikiran sehingga tingginya tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecakapan dalam melaut. Namun persoalannya muncul ketika nelayan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan atau mendapatkan pekerjaan lain di saat paceklik. Dengan pendidikan yang rendah jelas hal tersebut akan mempersulit nelayan dalam mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi nelayan. (Kusnadi 2002)

Ketrampilan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar orang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Dimana dengan ketrampilan tinggi, produktifitas tinggi dan akan dapat memicu peningkatan pendapatan yang diterimanya. Berdasarkan hasil survei baik untuk nelayan Sidoarjo, ternyata umumnya para nelayan tidak memiliki ketrampilan alternatif selain menangkap ikan. Sedangkan yang memiliki ketrampilan alternatif rata-rata ketrampilan yang mereka kuasaipun tidak jauh dari ketrampilan mengerjakan pekerjaan kasar seperti menukang. (Hidayati dan Solichah, t.t)

Bagi Nelayan untuk mendapatkan ketrampilan tertentu tidaklah semudah membalik telapak tangan karena selain faktor biaya juga dikarenakan mereka harus meninggalkan pekerjaan rutin mereka yakni melaut. Oleh karena itu harus ada inisiatif dari pihak tertentu misalnya Pemerintah Daerah untuk memberikan bekal ketrampilan secara gratis dan waktunya disesuaikan dengan kelonggaran mereka. (Hidayati dan Solichah, t.t)

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan tentang keikutsertaan mereka dalam pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah ternyata di Sidoarjo mayoritas mengatakan tidak pernah mengikuti pelatihan. Sementara itu hasil wawancara dengan Dinas Kelautan, mereka mengatakan bahwa alokasi program yang dilakukan untuk masyarakat pesisir lebih banyak dalam bentuk hibah sarana seperti jaring, pengecatan prahu, diesel perahu, pelampung dan alat penangkap ikan lainnya. Sementara program pelatihan jarang dilakukan. Pekerjaan alternatif diperlukan oleh nelayan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya. Apalagi penghasilan dari menangkap ikan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin melambung. Kaitannya dengan pekerjaan sampingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum nelayan tradisional di Sidoarjo tidak memiliki pekerjaan alternatif. (Hidayati dan Solichah, t.t)

Terlepas dari kehidupan ekonomi yang sulit, kehidupan sosial masyarakat pesisir, Kabupaten Sidoarjo khususnya, memiliki budaya yang cukup unik yaitu Nyadran. Budaya atau tradisi nyadran merupakan kegiatan sedekah laut. Salah satu desa pesisir yang kerap kali mengadakan kegiatan ini adalah Desa Bluru Kidul. Desa yang memiliki penduduk sejumlah 300 orang yang berprofesi sebagai nelayan ini melakukan tradisi nyadran agar mereka mendapatkan berkah dari laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Seperti yang pernah dilaksanakan pada tahun 2011. Pada saat itu sedikitnya 70 perahu, turut meramaikan prosesi nyadran yang dimulai di kampung nelayan Desa Bluru Kidul tersebut. Antusias nelayan maupun masyarakat untuk mengikuti nyadran memang cukup besar. Para pesertanya pun juga

tidak hanya berasal dari warga sekitar tetapi juga di luar Desa Bluru Kidul yang ikut menyemarakkan nyadran.



Gambar 2.4 Tradisi Nyadran yang dilakukan masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo

Untuk proses nyadran, para peserta membawa tumpeng yang nantinya akan diletakkan di makam Dewi Sekardadu di Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Di makam Dewi Sekardadu tersebut, peserta nyadran memanjatkan doa agar segala kegiatan di laut selalu diberkahi dan dilindungi Allah SWT.

BAB 3

PEREMPUAN NELAYAN

3.1 Peran Perempuan dalam Masyarakat Pesisir

Dalam hubungan sosial masyarakat, konsep peran dan status merupakan dua aspek yang dianggap paling penting. Peran merupakan perilaku individu dalam struktur sosial, dan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang akhirnya akan memberikan fasilitas tertentu sesuai dengan peranan tersebut. Sedangkan status mengindikasikan posisi individu dalam masyarakat. Artinya, status memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. (Naping 2012) Seseorang dinilai telah berperan, bila telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai statusnya. Peran diperoleh seseorang atas status yang dimilikinya. (Pujileksono 2006)

Pada abad 21, pengembangan citra dan prospek perempuan membentuk beberapa peran perempuan, yaitu peran tradisi, yang menempatkan wanita dalam fungsi reproduksi, perempuan sebagai pengurus rumah tangga sepenuhnya, ranah domestik; peran transisi dimana perempuan telah turun ke ranah publik tapi tetap memertingkan peran domestik; dwiperan posisi perempuan seimbang antara ranah domestik dan publik; peran egalitarian, kegiatan publik lebih banyak menyita waktu dan perhatian perempuan. (Naping 2012) Menurut Hemas (1992:91), tugas seorang perempuan saat ini yakni sebagai istri, ibu rumah tangga, tenaga kerja, pendidik, pembawa keturunan bangsa, dan sebagai anggota masyarakat.

Dalam ekonomi rumah tangga, peran perempuan di Indonesia secara umum sebagai pelaku dan pengelola ekonomi tangga. Keberhasilan seorang perempuan kadang dilihat dari sejauh kemampuannya dalam mengatur keuangan agar pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Peranan perempuan lebih kompleks ketika perempuan turut membantu melakukan pekerjaan membantu suaminya menambah penghasilan keluarga. Tidak sedikit dari perempuan yang membantu usaha suaminya bahkan memiliki usaha sendiri. Ketika

dibebani pekerjaan publik, perempuan tidak serta-merta melupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan memainkan peran ganda.(Naping 2012)

Dalam perekonomian masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perempuan memiliki peranan besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, peran mereka ini masih terabaikan dalam kebijakan saat ini. Seorang aktivis Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Mida Saragih (2012) dalam Harjono (2012) mengungkapkan bahwa perempuan di masyarakat nelayan memiliki kontribusi sebesar 48 persen untuk pendapatan keluarga tiap bulannya. Perempuan berada di posisi strategis di daerah pesisir dan berpeluang mengubah keadaan. (Harjono 2012)

Perempuan dalam masyarakat pesisir memegang peranan yang amat penting dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Selain harus bertanggung jawab terhadap urusan domestik, perempuan (istri) juga harus membantu tugas atau pekerjaan laki-laki (suami) dengan cara terlibat aktif mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.(Nuraini 2014)

Di beberapa daerah di Indonesia, para perempuan nelayan menjalankan 3 peran, yaitu peran reproduktif (rumah tangga/domestik), produktif dan sosial kemasyarakatan (publik). Kegiatan reproduktif umumnya dilakukan oleh para perempuan nelayan tersebut, dengan alokasi waktu yang dicurahkan per hari (24 jam) adalah sebesar 31.63% setara dengan 7.59 jam. Pada kegiatan produktif, curahan waktu laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 49.29%, setara dengan 11.83. Alokasi waktu yang dicurahkan perempuan pada kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu sebesar 5.75% atau setara dengan 1.38 jam, sedangkan laki-laki sebesar 0.5% atau setara dengan 0.12 jam. Pengambilan keputusan pada sektor domestik lebih banyak dilakukan oleh perempuan dan juga atas kesepakatan bersama antara suami dan istri. Pada sektor publik, tidak terjadi pendominasian yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Dalam kegiatan kersasyarakatan, akses perempuan dalam kelernbagaan cukup tinggi. Ketidakadilan gender terlihat pada kasus ini adalah stereotipe dan beban kerja ganda. Faktor-

faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender di antaranya, yaitu faktor budaya yang masih mengakar dalam masyarakat serta rendahnya tingkat ekonomi suatu keluarga.(Nuraini 2014)

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan nelayan menjadikan perempuan juga patut disebut sebagai nelayan. Salah seorang perempuan nelayan bernama Erna Lenka mengatakan bahwa ia sehari-harinya menghabiskan 17 jam bekerja di tambak udang milik suaminya. Di tambak seluas 200 meter persegi, dia melakukan 95% pekerjaan di sana sendirian. Yang dilakukannya antara lain menyiapkan pupuk, lahan yang ada, setelah itu pengisian air, setelah pengisian air, menebar benih, setelah tebar benih, sambil menunggu udang besar, ia memberi pupuk dan memberi makan setiap hari. Jumiati juga menegaskan bahwa untuk semua kegiatan penangkapan ikan, itu diawali dari proses seorang perempuan, bagaimana dia menyiapkan makanan untuk suami berangkat melaut. Dan bagaimana suami pulang melaut, sang perempuan nelayan juga yang menjualkan hasil tangkapnya, atau mungkin juga hasil tangkapnya diolah menjadi produk-produk yang bisa menghasilkan keuangan.



Gambar 3.1 Perempuan nelayan sedang menangkap kerang di Kabupaten Sidoarjo

3.2 Peluang dan Tantangan Perempuan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Keanekaragaman hayati dan hewani laut Indonesia sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian negara apabila dikelola dengan baik. Bahkan, Menteri Perikanan dan Kelautan saat ini, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa sekitar 80 persen dari sumber daya di sektor kelautan dan perikanan belum terjamah dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. (Antara Riau, 2015)

Agar dapat memanfaatkan sumber daya di sektor kelautan dan perikanan, tidak cukup hanya nelayan laki-laki saja yang berusaha memanfaatkan sumber daya tersebut, justru perempuan nelayan lah yang harus didorong untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Apalagi dilihat dari peran perempuan dalam kehidupan masyarakat pesisir yang begitu besarnya. Keterlibatan perempuan nelayan dalam berdagang ikan/kerang, bekerja pada pemindangan ikan, pengeringan ikan, pembuatan krupuk kerang, pengulitan kerang dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan nelayan berpeluang untuk menghasilkan produksi perikanan yang lebih tinggi nilai jualnya yakni menjadi barang jadi atau setengah jadi, tidak hanya barang mentah saja.

Akan tetapi, perempuan nelayan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tantangan-tantangan tersebut antara lain tantangan budaya patriarki masyarakat pesisir, kurangnya pendidikan, dan kurangnya dukungan pemerintah. Budaya patriarki masyarakat pesisir yang masih menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan membuat perempuan nelayan menjadi tidak maksimal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Perempuan nelayan ini juga sebagian besar kurang berpendidikan sehingga tidak memiliki cukup ilmu untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di daerah mereka. Para perempuan nelayan ini kurang mampu dalam menciptakan produk dari hasil laut yang bernilai jual tinggi. Umumnya mereka hanya mengolah hasil laut seadanya saja, seperti dijadikan ikan asin, atau kerupuk. Padahal hasil

budidaya laut dapat menjadi berbagai macam produk makanan maupun kosmetik.

Selain itu, dukungan pemerintah untuk para perempuan nelayan ini masih kurang. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi nelayan di sektor kelautan dan perikanan nisbi masih sama dengan yang terjadi selama 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di sektor kenelayanan, permasalahan yang ada masih seputar perlindungan wilayah tangkap, perlindungan jiwa nelayan, permodalan, dukungan pengolahan ikan melalui pembuatan "cold storage" dan akses pemasaran. Sementara di sektor perempuan nelayan, menurut dia, sampai hari ini belum ada pengakuan terhadap kontribusi perempuan nelayan. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan belum mengakomodasi kepentingan perempuan nelayan. (Antara Riau, 2015)



Gambar 3.2 Perempuan nelayan sedang menguliti kerang hasil tangkapan Di Kabupaten Sidoarjo

Hal senada juga dikemukakan oleh Mida Saragih, aktivis Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, menyatakan bahwa, walaupun sebenarnya perempuan nelayan berpeluang untuk mengangkat kesejahteraan keluarganya, hingga saat ini peran mereka tidak diakui dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Masih ada bias gender di ranah tersebut. Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan bertambahnya beban akibat dampak pembangunan menjadikan perempuan di pesisir sulit keluar dari keterpurukannya. (Harjono 2012)

BAB 4

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Wilayah pesisir merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya maritim yang dapat mendorong terpacunya perekonomian negara. Namun saat ini wilayah pesisir belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya manusianya. Berdasarkan kajian yang diperoleh peneliti baik dari buku, jurnal, literatur dan sumber-sumber lainnya dibutuhkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan dari berbagai pihak (seperti pemerintah dan perguruan tinggi) agar wilayah pesisir dapat berperan optimal menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Maka antara pihak terkait dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun masyarakat pesisir yang berdaya dan mandiri. Pada akhirnya diharapkan ekonomi pesisir dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi nasional menuju kemandirian. (Pranada 2014) Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Pemberdayaan apakah yang dimaksud? Menurut Bronwyn A. Hunter, Leonard A. Jason dan Christopher B. Keys (2012) dalam paper mereka "Factors of Empowerment for Women in Recovery from Substance Use" menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu konstruksi interdisipliner yang didasarkan pada teori-teori psikologi masyarakat. Meskipun pemberdayaan memiliki landasan teoritis yang kuat, hanya ada beberapa penelitian kuantitatif dalam konteks-spesifik yang telah dirancang untuk mengevaluasi pemberdayaan untuk populasi tertentu. Hasil dari analisis faktor eksplorasi mengidentifikasi tiga faktor pemberdayaan psikologis yang terkait erat dengan konsep konseptualisasi konseptual sebelumnya, yakni: persepsi diri, pengetahuan dan partisipasi sumber daya. Analisis lebih lanjut menunjukkan hubungan hierarkis di antara ketiga faktor tersebut, dengan pengetahuan sumber daya memprediksi partisipasi saat mengendalikan persepsi diri. Akhirnya, analisis korelasional

menunjukkan validitas konstruk awal masing-masing faktor, karena masing-masing faktor pemberdayaan secara signifikan dan positif terkait dengan harga diri.

Haya Al-Dajani dan Susan Marlow (2013) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan lebih cenderung dianggap sebagai proses daripada sebagai sebuah tujuan. Pemberdayaan juga biasanya ditujukan kepada orang-orang kurang memiliki kekuatan karena adanya marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan atau ketidakadilan sosial. Konsep pemberdayaan juga identik dengan perempuan karena dalam budaya patriarki manusia, wanita selalu dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Akan tetapi, Sholkamy (2010) dalam Al-Dajani dan Marlow (2013) punya pendapat yang berbeda, yakni bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan juga agensi dimana perempuanlah yang menjadi agen dan aktor utama dalam proses perubahan tersebut. Dari pemikiran Sholkamy ini, Al-Dajani dan Marlow (2007:20) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah sebuah siklus berkelanjutan "yang melibatkan kemampuan yang ditingkatkan untuk mengendalikan pilihan, keputusan dan tindakan" untuk bertindak dengan orang lain untuk mempengaruhi perubahan sosial (Jabre et al, 1997 dalam Al-Dajani dan Marlow 2013). Definisi ini menegaskan kembali peran individu dalam berkontribusi terhadap perubahan sosial di dalam komunitasnya (Mosedale, 2005 dalam Al-Dajani dan Marlow 2013).

Terkait dengan masyarakat pesisir, sumber daya pesisir dan laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan sumberdaya. Masyarakat memegang peranan penting, karena itu pengelolaan dengan berbasis pemberdayaan sumberdaya lokal. Tradisi dan hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Stanis 2005)

Apalagi, secara ekonomi, hasil sumber daya wilayah pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional. Wilayah

pesisir merupakan kawasan perbatasan antar negara maupun antar daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Karena wilayah pesisir ini penting bagi *human security* suatu negara, maka kesejahteraan masyarakat pesisir perlu diperhatikan. Pentingnya peran perempuan dalam masyarakat pesisir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah mendorong diadakannya pemberdayaan perempuan khususnya perempuan nelayan. Pemberdayaan perempuan nelayan ini dapat ditinjau dari dua sisi pemberdayaan, yakni pemberdayaan ekonomi produktif dan pemberdayaan berbasis potensi lokal yang pada akhirnya akan membentuk sebuah model pemberdayaan perempuan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

4.1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Masyarakat pada umumnya yang memiliki kegiatan usaha berkeinginan untuk lebih meningkatkan produktivitasnya, namun biasanya terhambat oleh modal dan manajemen. Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya akses informasi pasar dan teknologi, kurangnya peningkatan sumber daya manusia dan kurangnya sensitifitas gender di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemberdayaan ekonomi produktif perlu dilakukan.

Pemberdayaan ekonomi produktif, bila diartikan satu persatu maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Produktif artinya banyak menghasilkan, dan atau mampu memproduksi (Sudarmadi 2009). Pelaksanaan ekonomi produktif selain merupakan bentuk pemberdayaan komunitas terpencil, pada sisi lain, merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada usaha kecil atau yang dikenal sebagai ekonomi rakyat. Usaha-usaha tersebut dijalankan dalam skala terbatas dan subsisten, diprioritaskan untuk pasar sendiri atau

dipasarkan dalam jangkauan terbatas agar berbagi potensi masyarakat dapat berkembang dan memperkuat potensi ekonomi atau daya saing yang dimiliki komunitas terpencil.

Banyak ragam program pemberdayaan ekonomi produktif yang dimiliki dan dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah lokal dan internasional, perusahaan dan koperasi, perbankan, lembaga akademisi, lembaga donor, dan lembaga lainnya. Sasaran pemberdayaan ekonomi produktif ini bisa mencakup rumah tangga, kelompok usaha, koperasi dan sebagainya. Nuryoso (2008) mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif bisa diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu dan dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan bisa dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Program pemberdayaan ekonomi produktif memerlukan proses yang panjang, kreatifitas, berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam merencanakan dan menyusun program tersebut butuh pemikiran yang matang dan solutif serta data-data yang faktual dan mendukung keberhasilan program tersebut. Diharapkan dengan program pemberdayaan ekonomi produktif ini, masyarakat dapat lebih mandiri dalam hal ekonomi dan kesejahteraan meningkat. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi produktif tidak bisa terlepas dari kemauan kuat dan komitmen serta partisipasi bersama semua pihak.

Pihak yang perlu ikut berpartisipasi demi keberhasilan suatu program pemberdayaan ekonomi produktif tidak hanya kelompok masyarakat tapi juga pemerintah dan perguruan tinggi. Kelompok masyarakat disini artinya adalah kelompok masyarakat yang membentuk suatu organisasi sosial ekonomi. Temuan studi pada berbagai komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi sosial ekonomi maupun lembaga terkait lainnya yang ada di desa pesisir memegang peranan penting dalam perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan kata lain bahwa organisasi sosial ekonomi bisa menjadi penunjang dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Tanpa organisasi sosial ekonomi, nelayan akan bekerja dan hidup

sendirian tanpa ada yang memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka (Mantjoro, 1988 dalam Wasak 2012).

Tak cukup dengan organisasi sosial ekonomi masyarakat, pemerintah juga perlu memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan tersebut dan menciptakan iklim yang baik untuk tumbuh kembangnya usaha ekonomi produktif. Selain itu, peran perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan agen perubahan memegang posisi penting bagi pengembangan ekonomi. Kemitraan penelitian yang kuat dengan industri, menciptakan ekosistem kewirausahaan, pengembangan ekonomi wilayah dan nasional, maka perguruan tinggi juga menggali dan mendiseminasikan pengetahuan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan dan pengembangan usaha dalam bentuk inkubator. Dalam hal ini perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat inovasi yang membantu inovator mendapatkan ide kemudian mewujudkannya menjadi suatu usaha (Kaplan, 2004 dalam Supriyadi 2017).

4.2.Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal

Indonesia dianugerahi oleh Tuhan dengan beragam sumber daya baik alam maupun manusia. Kesemuanya itu harus dapat diberdayakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat bersama. Terkadang kita lupa bahwa ada banyak potensi yang belum digali dan dikembangkan di daerah kita sendiri. Padahal hal tersebut memiliki manfaat dan keuntungan yang luar biasa apabila diolah secara kreatif, baik, dan benar.

Potensi lokal juga turut andil dalam berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan. Potensi dan Kearifan Lokal Sebagai Basis Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Potensi dan kearifan lokal adalah beberapa bagian dari kapital yang dimiliki oleh masyarakat. Program pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak berdasar pada nilai-nilai lokal yang telah mengakar di masyarakat. Francis Fukuyama (dalam Jousairi Hasbullah. 2006:8) menyebutkan bahwa pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar

cenderung akan merasakan kemajuan, dan akan mampu secara efektif dan efisien memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Kearifan lokal adalah merupakan modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial dalam suatu masyarakat bisa menjadi perekat antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, hal itu sesuai dengan pendapat Isbandi Rukminto Adi (2007:58), yang berpendapat bahwa: Modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu, baik dalam perilaku ke dalam (internal kelompok) maupun perilaku ke luar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain).

Inti dari konsep modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai suatu pola interaksi yang imbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun atas dasar kepercayaan yang ditopang oleh nilai-nilai sosial yang positif dan mengakar kuat di masyarakat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan, adapun unsur-unsur yang ada dalam modal sosial menurut Francis Fukuyama (dalam Jousairi Hasbullah, 2006:10) adalah sebagai berikut : 1)Adanya partisipasi dalam suatu jaringan. ; 2) *Resiprocity*; 3)*Trust* (rasa percaya); 4)Norma Sosial ; 5)Nilai-nilai; 6)Tindakan yang proaktif.

Dari beberapa teori tentang modal sosial di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam upaya proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan modal sosial antara lain sikap yang

partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memasang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus-menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Dilihat dari perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan, maka diperlukan pendekatan yang tepat sehingga upaya peningkatan kehidupan masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

Pendekatan partisipatif merupakan alternatif yang bisa dipakai dalam upaya pengelolaan lingkungan ini. Dalam pendekatan partisipatif, maka akan tampak akan diperlukannya perencanaan partisipatoris dalam melakukan perubahan terencana di level komunitas pada dasarnya sejalan dengan akar berkembangnya pengembangan masyarakat.

Menurut Adi (2007:23) mengemukakan bahwa : Salah satu inti utama dari diskursus komunitas ataupun metode intervensi pengembangan masyarakat adalah asumsi bahwa "masyarakat bukanlah sekumpulan orang bodoh", yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah (instruksi) belaka. Suatu komunitas telah mencapai pada taraf dimana dia berada saat ini, sebenarnya telah melalui suatu proses evolusi yang cukup panjang. Hampir setiap komunitas telah mengembangkan dan mempunyai kearifan lokal (Local Wisdom) sejalan dengan upaya mereka mengatasi permasalahan yang ada. Setiap komunitas telah mengembangkan metode adaptasi yang relatif canggih dalam rangka mengelola lingkungannya. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai makhluk bodoh". Dari pendapat di atas, mengindikasikan bahwa dalam komunitas/masyarakat mempunyai potensi yang bisa digali untuk kemudian bisa dijadikan pijakan awal sebagai modal dalam pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ife (2002, 53) dalam (Isbandi Rukminto Adi, 2007:15) yang mengemukakan bahwa "Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan keberdayaan (power) pada mereka yang kurang diuntungkan". Dalam

upaya pemberdayaan, maka adanya partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, karena tidak lain tujuan dari pemberdayaan adalah upaya untuk memunculkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Sementara itu, lanjut Isbandi Rukminto Adi (2007:25) Partisipasi masyarakat adalah: Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan akan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta maka masyarakat cenderung akan menjadi lebih tergantung pada agen perubah. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka ketergantungan masyarakat pada agen perubah akan menjadi semakin mengikat.

Proses program pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan pendapat Isbandi Rukminto (2007:42-43) tentang konsep Community Base Development, ia mengatakan bahwa : Pemberdayaan masyarakat akan berjalan secara optimal jika potensi lokal dan kondisi masyarakat lokal menjadi dasar pemberdayaan, sehingga modal pemberdayaan tidak bisa dalam bentuk terpusat. Dari pendapat di atas mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang ada.

Dengan demikian, strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat yang dapat

dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir. Dengan adanya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat miskin pesisir berbasis potensi dan kearifan lokal maka harapannya kemudian adalah: 1) Mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin; 2) Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; 3) Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; 4) Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis; 5) Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; 6) Mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen, serta ; 7) Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola melanjutkan program tersebut.

Selain itu asumsi dan prasangka negatif terhadap kemampuan dan perilaku masyarakat pesisir harus dihindari oleh para konsultan pemberdayaan. Tugas mereka dalam pemberdayaan adalah menciptakan ruang kapabilitas agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam proses pembangunan lokal. Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki potensi sumber daya atau modal sosial yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan dirinya secara optimal (Kusnadi, 2003).

4.3. Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Kesempatan peran perempuan nelayan memiliki peluang yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga karena suami mereka memiliki kebiasaan yang baik yaitu menyerahkan hasil usaha melaut mereka kepada kaum wanita dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada wanita untuk mengelola. Wanita pesisir juga dapat bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan baik yang berhubungan dengan sektor perikanan maupun tidak berhubungan dengan sektor perikanan. Peran perempuan nelayan dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Hikmat (2004) mengemukakan pembagian peran yang sejajar khususnya dari aspek ekonomi perikanan dimana wanita mengurus pasca panen dan pemasaran hasil perikanan termasuk pengawetan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil, sementara pria pada aspek

produksi melalui kegiatan penangkapan ikan dapat menjadi salah satu cara mendorong partisipasi wanita yang lebih baik. Peran ini didasari pada berbagai kesulitan dalam kegiatan produksi perikanan laut. Penguatan aspek pasca panen dan pemasaran tidak hanya bermakna bagi para wanita nelayan, tetapi aktivitas perikanan secara keseluruhan karena aspek ini menjadi titik terlemah kegiatan produksi perikanan.

Hikmah (2007) juga menyatakan program penguatan dapat dilakukan misalnya melalui penguatan kelembagaan usaha berbasis kelompok. Penguatan ini memiliki makna positif karena dapat memperkuat *bargaining position* para wanita terhadap pesaing yang umumnya kaum pria dengan modal yang lebih besar, mempermudah akses terhadap modal, pasar, informasi, dan teknologi. Pada akhirnya, pengembangan program pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan yang terpadu dengan kegiatan lainnya seperti wisata bahari merupakan peluang besar bagi aktualisasi peran istri nelayan. Pengembangan usaha ekonomi produktif oleh kelompok pemanfaat yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan usaha, aspirasi dan tujuan. Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan tentu saja berdasarkan atas potensi sumberdaya alam yang tersedia, peluang pasar, kemampuan dan penguasaan teknologi oleh masyarakat, serta dukungan adat dan budaya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi produktif tersebut dapat merupakan usaha budidaya ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, serta usaha jasa yang mendukung seperti penyediaan sarana produksi lainnya.

Intinya, konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara

kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang semakin baik pula kemampuan partisipasinya.

Wahyono et al. (2001) dalam Surjono dan Nugroho (2007) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan memberi peranan pada individu sebagai pelaku (actor) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal sebagai mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Suryono dan Nugroho (2007) menyatakan terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yakni (1) pendekatan yang terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah dan berpihak kepada orang miskin; (2) pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi; dan (3) pendekatan pendampingan, artinya dilakukan selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendampingan yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Terdapat empat strategi yang ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa yaitu (1) memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subjek; (2) mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan /pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif atau demokratis,

efektif dan efisien; (3) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalismenya; dan (4) memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan atau desa dalam memfasilitasi dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berjalan lancar (Prasojo 2006). Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat harus pula melalui proses pendekatan yang tidak membuat aneh dan kaget serta curiga masyarakat sehingga pemberdayaan dapat diterima oleh masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh tokoh gerakan pembangunan masyarakat China, Y.C Yen (1920) dalam Sihombing (2005) yang mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memberdayakan masyarakat harus melakukan 12 prinsip berikut.

- 1) Mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan.
- 2) Mencoba mengenali dengan baik kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut.
- 3) Memahami cara berpikir masyarakat agar dapat mengetahui potensi yang mereka miliki.
- 4) Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan.
- 5) Melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana.
- 6) Mengimplementasikan program sesuai dengan apa yang diketahui masyarakat dan pahami.
- 7) Membangun sesuatu dari modal yang dimiliki masyarakat.
- 8) Mengajari masyarakat dengan contoh konkret/nyata.
- 9) Mengajari masyarakat pola implementasi kegiatan.
- 10) Menciptakan suatu sistem yang dapat dipahami dan dijalani oleh masyarakat.
- 11) Menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu.
- 12) Memberikan kebebasan masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

Dengan adanya 12 prinsip diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian dengan makin berkembangnya pembangunan, perempuan mempunyai peranan yang nyata di dalamnya. Program pemberdayaan yang sesuai merupakan salah satu cara dalam

mengoptimalkan peran wanita dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga. Apabila peran perempuan sudah dapat dioptimalkan, tentunya hal ini dapat membuat ekonomi keluarga meningkat karena wanita ikut berperan serta di dalam sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acy. 2012. Ekosistem Pesisir dan Pengelolaannya Di Indonesia. www.terangi.or.id . Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI. Press.
- Al-Dajani, Haya dan Susan Marlow. 2013. Empowerment and entrepreneurship: a theoretical framework, dalam *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 19 No. 5, 2013 hlm. 503-524*. Emerald Group Publishing Limited
- Andarini, Sonja, dkk. 2016, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, UPN Veteran Jawa Timur
- Asyiwat, Yulia dan Sinung Rustijarno, 2007, Kontribusi Ekonomi Desa-Desa Pesisir Terhadap Pendapatan Wilayah Kabupaten Bantul, dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7, No. 1, Unisba*
- Azkar, H, M. 2010. Bahan Ajar Tentang Lamun. Lembaga Penelitian Oseanografi-LIPI: Jakarta.
- Bengen, D.G. 2001. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut (Sinopsis). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Chairil, A., dan Gunawan, H., 2007. Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove Dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir. Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan 20 September 2006, Padang
- Cicin-Sain, B. & R. W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices. Island Press: Washington D C.
- Dahuri, R. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Djau, Mohamad Sayuti Djau. 2012. Analisis Keberlanjutan Sistem Perikanan di Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Olee dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Thesis. Institut Pertanian Bogor
- Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta : MR-United Press

- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu, 1992, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*, Yogyakarta: Liberty
- Hikmah, Istiana. 2007. *Gender dalam rumah tangga masyarakat nelayan*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan
- Hikmat. 2004. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama
- Hunter, Bronwyn A., Leonard A. Jason dan Christopher B. Keys. 2012. *Factors of Empowerment for Women in Recovery from Substance Use*, dalam *Am J Community Psychol (2013) 51;91-102*. Society for Community Research and Action
- Kahar, Adi Pasah. 2014. *Pengembangan Bahan Ajar Ekosistem Mangrove Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Kay, R.C. & J. Alder, J. 2005. *Coastal Planning and Management*. London, E&F Spon. Hlm 380
- Keraf. 2000. *Dimensi Budaya Ekologi Pesisir Dalam Pengembangan*
- Kusnadi, (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*, LKIS, Yogyakarta.
- Latama, 2002. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*
- Lewaherilla, N.E. 2002. *Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Manumono, Danang. 2008. *Perubahan Perilaku Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten Demak*. Pusat Analisis Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Naping, Hamka. 2012. *Perempuan Pesisir dan Rumput Laut: Studi Perubahan Peranan Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Biangkeke Kabupaten Bantaeng*, dalam *Walasuji Vol.3, No.2*, Desember 2012, Hlm 169-180
- Nuryoso, Agus. 2008. *Fisip Undip Rintis Desa Mandiri Melalui UEP*. Universitas Diponegoro
- Pranada, Muhammad Teguh, dkk. 2014, *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Wilayah Pesisir Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)*,

- 8th Annual Conference Of Economics Forum, Universitas Sumatera Utara.
- Prasojo, Eko. 2006. Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Prianto, E. 2005. Proseding "Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pujileksono, Sugeng, 2006, Petualangan Antropologi, Malang: UMM Press
- Purba, Jhony. 2002. Pengelolaan Lingkungan sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Purba, Johny. 2002. Pengelolaan Lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 156.
- Purnama, A. A. 2011. Pemetaan dan Kajian Beberapa Aspek Ekologi Komunitas Lamun di Perairan Pantai Karang Tirta. Tesis Pascasarjana Universitas Andalas. Padang
- Stanis, Stefanus. 2005. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro
- Sudarmadi, Anton. 2008. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif "Sidodadi" oleh Karang TARuna "Bangun" Desa Srimartani Piyungan Bantul. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Suprijanto, Iwan. 2006. Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia, dalam Proceeding – Studi Dampak Timbal Balik Antara Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global
- Supriyadi, Dudi, 2017, Upaya Menumbuhkan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Perguruan Tinggi, Coopetition Vol III, No.1, Maret 2017, Hlm 17-25
- Suryono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2007. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.

Wahyono A. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Jogjakarta: Media Pressindo

Wisata Bahari. Naskah Seminar, Denpasar Kajian Budaya Universitas Udayana. Bali: Universitas Udayana.

Artikel Online

Antara Riau. 2015. Tantangan Sektor Kelautan Dari Nelayan Hingga SDA, diakses dari <<http://www.antarariau.com/berita/60390/tantangan-sektor-kelautan-dari-nelayan-hingga-sda>> pada 21 Agustus 2017

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011. Modul Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, Diklat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH RI –2011, diakses dari <<http://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/244/MENGENAL- EKOSISTEM-PESISIR-DAN-LAUT.html>> pada 19 Agustus 2017

Harjono, Yulvianus. 2012. Peran Perempuan Masyarakat Pesisir Masih Terabaikan, diakses dari <<http://regional.kompas.com/read/2012/03/09/14340829/peran.pereempuan.masyarakat.pesisir.masih.terabaikan>> pada 18 Agustus 2017

Hidayati, Roziana Ainul dan Mu'minatus Sholichah. T.T. Kemiskinan Nelayan Di Pantai Utara Jawa Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik, diakses dari <http://digilib.umg.ac.id/download.php?id=3738>, pada 18 Agustus 2017.

Irwanto, 2006. Keanekaragaman Fauna Pada Habitat mangrove. Yogyakarta, diakses dalam <<https://www.scribd.com/document/45887194/Fauna-Mangrove>>, pada 20 Agustus 2017

Kabar Sidoarjo. 2011. Nelayan Bluru Kembali Gelar Tradisi Nyadran, diakses dari < <http://kabarsidoarjo.com/2011/02/27/nelayan-bluru-kembali-gelar-tradisi-nyadran/>>, pada 20 Agustus 2017

Nuraini, Aminah, 2004, Peranan Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat Pesisir di Muara Angke (Suatu Studi dari Perspektif

- Jender, Institut Pertanian Bogor, diakses dari <<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/14800>> pada 19 Agustus 2017
- Sihombing, Marlon. 2005. Pengembangan Wilayah Melalui Paradigma Perencanaan Partisipatif, dalam Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Wahana Hijau, Vol.1, No.1, Bulan Agustus, diakses dari <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15966/wah-agu2005-%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> pada 20 Agustus 2017
- Suara Media Nasional, 2007, "Kendalikan Penangkapan Kerang Nelayan Sidoarjo Kenali Skema HCR", diakses dari <http://www.suaramedianasional.co.id/kendalikan-penangkapan-kerang-elayan-sidoarjo-kenali-skema-hcr.html>
- Suara Media Nasional, 2007, "Kendalikan Penangkapan Kerang Nelayan Sidoarjo Kenali Skema HCR", diakses dari <http://www.suaramedianasional.co.id/kendalikan-penangkapan-kerang-nelayan-sidoarjo-kenali-skema-hcr.html>
- Sudarmadi, Anton, 2009, *Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif "Sidodadi" Oleh Karang Taruna "Bangun" Desa Srimartani Piyungan Bantul*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses dari <<http://digilib.uin-suka.ac.id/2749/>>, pada 19 Agustus 2017
- Wasak, Martha. 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dalam *PACIFIC JOURNAL. Januari 2012 Vol. 1 (7): 1339 - 1342*, diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/280/1/KEADAAN_SOSIAL-EKONOMI_MASYARAKAT_NELAYAN_DI_DESA_KINABUHUTAN_KECAMATAN_LIKUPANG_BARAT._KABUPATEN_MINAHASA_UTARA%2C_SULAWESI_UTARA.pdf
- WWF, 2016. Menilai Kepatuhan untuk Meningkatkan Praktik Perikanan Kerang yang Lestari di Sidoarjo, diakses dari <http://www.wwf.or.id/?53302/Menilai-Kepatuhan-untuk-Meningkatkan-Perikanan-Kerang-yang-Lestari-di-Sidoarjo>, Pada 19 Agustus 2017



ISBN 978-602-7851-74-0